



PELUANG DAN TANTANGAN BAGI PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI TENGAH AGENDA MiC 2025 TIONGKOK

Hasna Dherin Syakira, Aisyah Zakiyah Nur Aini, Sovira Hikari Luna Shinkoo
Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Email: hasnadherinsyakira@student.uns.ac.id, aisyahzakiyah1@student.uns.ac.id,
sovirahikarilunashin@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Kata kunci:
MiC 2025; MNC;
China

Latar Belakang: Sejak reformasi ekonomi pada tahun 1978, perusahaan multinasional mulai berdatangan, berinvestasi, dan beroperasi di Tiongkok. Hal ini dikarenakan Tiongkok memiliki upah yang rendah, pasar yang besar, dan kebijakan pemerintah yang longgar. Tiongkok sering dikaitkan dengan persepsi negatif sebagai pusat tenaga kerja murah dan produk berkualitas rendah. Agenda MiC 2025 bertujuan untuk mengubah persepsi negatif tersebut. Selain itu, agenda ini juga bertujuan untuk mengejar ketertinggalan Tiongkok dalam bidang teknologi tinggi di pasar global. Tulisan ini menggunakan teori neo-merkantilisme dengan asumsi bahwa inisiasi pemerintah Tiongkok untuk mengakumulasi kekayaan negara dengan cara melindungi pasar dalam negeri dan mendukung investasi asing. Melalui MiC 2025, pemerintah berencana memperkuat dominasi Tiongkok di pasar global.

Tujuan: Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh agenda MiC 2025 terhadap perusahaan multinasional (MNC) di Tiongkok.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil: Hasilnya menunjukkan bahwa MNC mendapatkan peluang sekaligus tantangan dari realisasi agenda MiC 2025 yang penulis bagi menjadi 4 subbab besar yaitu 1) persaingan ekonomi, 2) kolaborasi dan transfer teknologi, 3) robotisasi tenaga kerja, dan 4) perang tarif dengan Amerika Serikat.

Kesimpulan: MNC perlu beradaptasi dan melakukan restrukturisasi di tengah agenda MiC 2025 yang dicanangkan pemerintah agar dapat beroperasi secara optimal.

ABSTRACT

Keywords:
MiC 2025; MNCs;
China

Background: Since the economic reforms in 1978, multinational companies have begun to arrive, invest, and operate in China. This was because China had low wages, huge markets, and loose government policies. China is often associated with a negative perception as a center for cheap labor and low-quality products. The MiC 2025 agenda aims to change that negative perception. Besides, this agenda also plans to catch up with China's high-tech in the global market. This paper uses the neo-mercantilism theory, assuming that the Chinese government's initiation to accumulate state wealth by protecting the domestic market and supporting foreign investment. Through MiC 2025, the government plans to strengthen China's dominance in the global market.

Purpose: This paper aims to describe the influence of the MiC 2025 agenda on multinational companies (MNCs) in China.

Methods: This research uses descriptive qualitative research methods.

Results: The results show that MNCs receive both opportunities and challenges from the realization of the MiC 2025 agenda, which the author divides into 4 major subchapters,

namely 1) economic competition, 2) collaboration and technology transfer, 3) robotization of labor, and 4) tariff war with the United States.

Conclusion: *MNCs need to adapt and restructure amidst the MiC 2025 agenda initiated by the government to operate optimally.*

PENDAHULUAN

Desakan dunia internasional untuk membuka pasar global mendorong Tiongkok untuk melakukan reformasi ekonomi pada tahun 1978. Reformasi di era Deng Xiaoping ini memberlakukan kebijakan Politik Pintu Terbuka (*Open Door Policy*) yang menyebabkan banyak perusahaan multinasional (*Multi National Company/MNC*) berdatangan ke Tiongkok dan beroperasi baik dalam lingkup domestik maupun internasional (Oswin et al., 2019). Tiongkok menjadi tujuan potensial bagi perusahaan asing karena beberapa hal, diantaranya gaji/upah pekerja yang minim, target pasar yang besar, dan kebijakan pemerintah yang longgar (Goldstein, 2019). Pada kuartar pertama tahun 2023, Tiongkok menjadi negara ketiga terbesar penerima dan pemberi investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) dengan masing-masing jumlah investasi mencapai 21 miliar USD dan 50 miliar USD (Pantelopoulos, 2023). Perusahaan multinasional cukup memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Tiongkok dengan pertumbuhan PDB riil sekitar 10% per tahun dalam kurun waktu 29 tahun terhitung sejak 1990-2019 (Peng, 2012). Keuntungan ini didapat dari lapangan kerja yang diserap dan proporsi ekspor yang tinggi dari perusahaan multinasional terutama perusahaan yang menanamkan modal asing (*Foreign Invested Enterprises/FIE*).

Kesuksesan perusahaan multinasional di Tiongkok tidak terlepas dari tantangan yang mengiringinya. Rendahnya upah tenaga kerja beriringan dengan tingginya pasar lokal menimbulkan persepsi yang melekat pada Tiongkok yaitu sebagai pusat pabrik dunia yang menghasilkan produk murah dengan kualitas rendah (Fang & Walsh, 2018). Oleh karena itu, pemerintah Tiongkok menginisiasi agenda Buatan Tiongkok (*Made in Tiongkok/MiC 2025*) sebagai bentuk perubahan persepsi negatif terhadap industri Tiongkok. MiC 2025 berusaha untuk mengurangi ketergantungan industri Tiongkok terhadap teknologi asing dengan menargetkan penambahan komponen teknologi lokal sebesar 40% pada tahun 2020 dan 70% pada tahun 2025 (Kennedy, 2015). Agenda MiC 2025 dianggap sebagai langkah yang tepat untuk mengatasi persaingan dagang internasional yang semakin mengedepankan penggunaan teknologi, salah satunya dalam industri manufaktur.

Namun, agenda MiC 2025 tidak sepenuhnya menjadi langkah yang tepat bagi perusahaan multinasional. Brown, (2016) dalam artikel jurnal yang berjudul "*Made in Tiongkok 2025: Implications of Robotization and Digitalization on Perusahaan Multinasional Labor Supply Chains and Workers' Labor Rights in Tiongkok*", menjelaskan mengenai pengaruh agenda MiC 2025 terhadap rantai pasokan tenaga kerja perusahaan multinasional di Tiongkok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agenda MiC 2025 yang berusaha melakukan perubahan fungsi tenaga kerja dengan robot berdampak pada menurunnya efektifitas nilai tenaga kerja. Hal ini menyebabkan perusahaan multinasional berpotensi untuk menarik investasi dari Tiongkok dan kembali beroperasi di negara asal dengan menggunakan teknologi robot daripada menggunakan tenaga kerja Tiongkok. Hal ini terjadi karena asumsi bahwa teknologi robot akan lebih efisien daripada tenaga kerja yang masih harus memerhatikan hak dan hukum dalam mempekerjakan tenaga kerja (L. D. Brown, 2003). Artikel ini menguraikan secara singkat mengenai peluang dan tantangan perusahaan multinasional. Digitalisasi dapat meningkatkan persaingan ekonomi secara besar-besaran antara perusahaan lokal dengan perusahaan multinasional. Namun, digitalisasi ini juga dapat memberikan peluang bagi perusahaan yang bergerak dalam sektor prioritas agenda MiC 2025. Perusahaan multinasional dapat berkolaborasi dan menyediakan komponen penting, teknologi, dan manajemen kepada perusahaan lokal (C. M. Brown et al., 2021).

Tulisan ini berusaha untuk menguraikan secara rinci pengaruh agenda MiC 2025 terhadap eksistensi perusahaan multinasional di Tiongkok. Penulis berargumen bahwa perusahaan multinasional berpotensi mendapatkan peluang dan ancaman dari agenda reformasi ekonomi ini. Oleh karena itu, tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan langkah yang tepat bagi perusahaan multinasional dalam memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman yang mungkin muncul dalam keberlangsungan agenda MiC 2025.

Penelitian ini menggunakan teori neo-merkantilisme sebagai landasan teori untuk menganalisis peluang dan tantangan bagi perusahaan multinasional di tengah agenda MiC 2025 Tiongkok. Teori neo-merkantilisme merupakan teori yang dikembangkan dari teori merkantilisme klasik. Teori merkantilisme klasik merupakan teori yang mengukur kemakmuran suatu negara dari banyaknya emas dan perak yang dimiliki. Oleh karena itu, teori ini menjustifikasi pengumpulan kekayaan sebesar-besarnya guna mencapai kepentingan nasional. Teori ini juga menjelaskan bahwa suatu negara berpotensi menerapkan kebijakan proteksionisme untuk melindungi perekonomian dalam negeri, salah satunya dengan mendorong ekspor dan membatasi impor. Timothy C. Lim mengungkapkan pembaruan dalam neo-merkantilisme dimana suatu negara tidak lagi bergantung kepada cadangan emas dan perak, tetapi juga cadangan devisa negara terutama mata uang asing (Lim, 2014). Negara juga cenderung protektif dan lebih memperhatikan industri pasar domestiknya (Lim, 2014). Pemerintah kerap kali ikut campur dalam pengembangan industri pasar domestik, salah satunya dengan menggunakan kampanye nasionalisme untuk mendorong penjualan produk domestik agar tidak kalah dengan produk asing (Lim, 2014). Oleh karena itu, pemerintah memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara.

Teori neo-merkantilisme menganggap bahwa campur tangan pemerintah pusat itu penting tidak hanya pada pasar internasional, tetapi juga pada pasar domestik untuk mengelola perekonomian di suatu negara. Teori ini dapat melihat bagaimana campur tangan pemerintah Tiongkok terkait dengan kebijakan domestik agenda MiC 2025. Sebagai inisiator, pemerintah ikut berkontribusi dalam mewujudkan agenda MiC 2025 dengan tujuan untuk mendominasi pasar global. Teori neo-merkantilisme cocok digunakan untuk analisis kebijakan pemerintah Tiongkok yang lain, seperti ketika Tiongkok menerapkan *Dual Circulation Strategy* (GIS Reports, 2021), yang mana strategi tersebut bertujuan untuk menguatkan pasar domestik dengan cara meningkatkan peran konsumen, memajukan teknologi, serta meningkatkan industri manufaktur dan jasa. Di samping memperkuat pasar domestik, Tiongkok juga membuka investasi untuk asing yang dimanfaatkan untuk transfer teknologi agar pasar lokal juga berkembang (Rooi et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode deskriptif diartikan sebagai metode penelitian dengan menggambarkan subjek dan objek beserta fakta-fakta dari sumber yang dapat dipercaya, seperti karya ilmiah, buku, artikel, dan publikasi relevan yang berkaitan dengan topik penelitian. Penggambarannya dilakukan secara kualitatif berdasarkan keadaan sebenarnya dengan menggali fakta secara menyeluruh dan mendalam. Melalui metode ini akan membantu mengeksplorasi dan menganalisis tentang peluang dan tantangan bagi perusahaan multinasional di tengah agenda MiC 2025 Tiongkok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan Multinasional di Tiongkok

Perusahaan Multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di dua negara atau lebih. Perusahaan Multinasional di Tiongkok dibedakan menjadi dua, yaitu perusahaan multinasional milik Tiongkok yang beroperasi di Tiongkok, dan yang kedua yaitu *Foreign Invested Enterprise* (FIE). FIE merupakan perusahaan multinasional asing yang melakukan investasi di Tiongkok dan beroperasi di Tiongkok, FIE biasanya akan menaati norma dan

aturan pemerintah yang ada pada *home country* (Dalla Valle, 2021)vv. Istilah FIE sendiri sering digunakan di wilayah Asia terutama Tiongkok.

Tiongkok adalah negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia (IDX Channel, 2023). Hal ini dapat dilihat dari pendapatan PDB Tiongkok pada tahun 2022 sebesar \$17,96 triliun kemudian pada tahun 2023 pendapatan PDB Tiongkok \$19,3 triliun (The World Bank, 2019). Perkembangan yang cukup pesat ini didasari oleh keinginan Tiongkok untuk terus mengembangkan perekonomiannya. Melihat perkembangan Tiongkok yang begitu pesat, para investor asing melihat hal tersebut sebagai peluang untuk berinvestasi terutama para perusahaan multinasional asing (Seong et al., 2023). Oleh karena itu, Tiongkok menjadi salah satu negara tujuan perusahaan multinasional untuk menanamkan modalnya.

Selain menjadi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, faktor populasi menjadi faktor lain yang menjadikan Tiongkok sebagai tempat strategis oleh perusahaan multinasional asing untuk menanamkan modalnya. Populasi Tiongkok yang mencapai 1,425 miliar jiwa pada tahun 2023 Yao et al., (2013), dipastikan bahwa tingkat konsumen di Tiongkok tinggi (Wang, 2000). Hal tersebut menjadikan Tiongkok sebagai ladang pekerja bagi perusahaan multinasional yang ingin berinvestasi. Jika dibandingkan dengan negara lain Tiongkok merupakan pilihan yang tepat bagi perusahaan multinasional yang ingin berhemat, karena tingkat efisiensi pekerja di Tiongkok lebih tinggi dan dapat dibayar dengan upah yang rendah. Jika dibandingkan dengan negara lain rata-rata upah pekerja dalam bidang manufaktur adalah \$6.50 perjam dan efisiensinya lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara bidang manufaktur dengan pekerja upah rendah lainnya seperti Vietnam dan Mesiko. Meskipun jika dibandingkan dengan Vietnam yang memiliki upah rata-rata \$2.99 namun efisiensi pekerja Vietnam adalah sepertiga pekerja Tiongkok, jadi jika dipertimbangkan akan lebih murah menanamkan modal di Tiongkok.

Selain itu, ada beberapa kebijakan pemerintah Tiongkok yang dianggap menguntungkan bagi perusahaan asing yang ingin menanamkan modalnya, hal ini menjadi magnet tersendiri bagi perusahaan multinasional. Kebijakan tersebut diantaranya seperti fleksibilitas dalam merekrut pekerja, kemudahan dalam mengurus administrasi pemerintahan, untuk impor peralatan pada proyek penanaman modal asing dibebaskan dari bea masuk, akses harga lahan yang lebih murah serta peraturan penggunaan lahan yang lebih longgar.

Banyaknya perusahaan multinasional yang melakukan FDI di Tiongkok membuat perusahaan multinasional lokal Tiongkok harus bersaing dan menemukan target pasarnya tersendiri agar tidak kalah dengan perusahaan multinasional asing yang masuk dan meluaskan pasarnya di Tiongkok. Hal tersebut dikarenakan dulunya Tiongkok dikenal sebagai negara dengan persaingan pasar yang rendah jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya yang pada saat itu sudah mengembangkan teknologi modern. Setelah adanya kebijakan *Open Door Policy*, banyak perusahaan barat maupun asia yang berinvestasi dan beroperasi di Tiongkok. Sebagai contoh, Korea Selatan dalam industri elektronik dan otomotifnya, seperti merk Hyundai, Samsung, LG, dan Kia (Lundvall & Rikap, 2022). Kemudian, untuk perusahaan teknologi dan retail dari barat seperti Apple dan Walmart (Lundvall & Rikap, 2022).

Disamping beroperasinya perusahaan multinasional asing di Tiongkok, perusahaan multinasional lokal Tiongkok juga terus berinovasi dan mengikuti perkembangan teknologi. Ada beberapa perusahaan multinasional lokal Tiongkok yang terus-terusan bersaing dan berkembang pesat, seperti Lenovo, Huawei, dan EV Maker NIO.

Agenda MiC 2025

MiC (Made in Tiongkok) 2025 adalah sebuah strategi nasional yang diterbitkan oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 2015. Strategi ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan mengkonsolidasi perekonomian pada bidang industri manufaktur secara menyeluruh (Balderrama & Trejo, 2018). MiC 2025 merupakan fase pertama dari 3 fase yang

diupayakan Tiongkok untuk mendominasi rantai pasokan global serta mempengaruhi standar internasional (CRS, 2019). Pada fase berikutnya yaitu pada tahun 2035, pemerintah Tiongkok akan fokus pada pengembangan industri manufaktur di tingkat menengah serta meningkatkan inovasi dan menciptakan produk terobosan baru. Kemudian pada fase terakhir yaitu pada tahun 2049, perkembangan industri manufaktur di Tiongkok akan mencapai puncaknya yang mana produk-produk Tiongkok akan mendominasi pasar global. Fase terakhir pada tahun 2049 memiliki makna tersendiri untuk pemerintah dan masyarakat Tiongkok yang mana tahun tersebut menepati peringatan 100 tahun berdirinya RRC (Balderrama & Trejo, 2018).

Strategi MiC 2025 juga dimaksudkan untuk melindungi posisi Tiongkok sebagai kekuatan internasional dalam industri teknologi tinggi (ISDP, 2018). Pemerintah Tiongkok melalui Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi mengambil langkah modernisasi struktur produktif dalam industri manufaktur sebagai langkah awal dalam MiC 2025. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas produksi dan juga menjadi peluang untuk menciptakan produk-produk unggul yang sesuai dengan perkembangan zaman. Modernisasi struktur produktif juga merupakan salah satu upaya pemerintah Tiongkok untuk mengubah persepsi global mengenai produk Tiongkok yang dikenal sebagai produk murah dengan kualitas rendah.

Pada proyek MiC 2025, Pemerintah Tiongkok berusaha untuk mengurangi ketergantungan Tiongkok dalam impor teknologi asing. Tiongkok menargetkan kenaikan jumlah kandungan komponen serta bahan inti dalam negeri yaitu 40% pada tahun 2020 dan 70% pada tahun 2025 (Kennedy, 2015). Pemerintah Tiongkok juga melakukan investasi dalam jumlah besar kepada inovasi-inovasi lokal, sehingga perusahaan lokal dapat bersaing baik pada tingkat nasional maupun internasional (ISDP, 2018). Investasi yang diberikan berupa bantuan dana dalam bentuk pinjaman serta subsidi untuk penelitian dan pengembangan terkait dengan inovasi baru yang menekankan pada kualitas produk. Investasi yang berfokus pada kualitas produk ini nantinya akan mengembangkan inovasi teknologi dan manufaktur yang unggul sehingga teknologi-teknologi yang dihasilkan akan sulit untuk ditiru. Hal tersebutlah yang nantinya menjadikan produk Tiongkok sebagai produk yang mendominasi pasar global.

Sejauh ini menurut para ahli, dukungan Pemerintah Tiongkok dalam hal finansial sangatlah besar. Setiap proyek pengembangan MiC 2025 akan mendapatkan bantuan dana sebesar 30 - 50 juta Yuan (Zheng & Lavruhina, 2019). Angka tersebut jika dikonversikan ke dalam USD akan setara dengan 4,10 juta - 6,83 Juta USD. Selain itu, para ahli juga menyebutkan untuk proyek-proyek teknologi umum atau utama akan memperoleh dukungan dana lebih dari 100 juta Yuan atau lebih dari 13,66 Juta USD (Zheng & Lavruhina, 2019). Terhitung pada tahun 2019, jumlah proyek MiC 2025 yang mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah Tiongkok telah mencapai lebih dari 100 proyek (Zheng & Lavruhina, 2019). Hal tersebut berarti bahwa pemerintah Tiongkok sudah menyalurkan lebih dari 10 miliar Yuan untuk proyek MiC 2025 pada tahun 2019.

Proyek MiC 2025 berfokus pada 10 sektor industri yang menjadi prioritas utama. Sektor-sektor tersebut adalah teknologi informasi baru, peralatan mesin otomatis dan robotika, peralatan dirgantara dan penerbangan, peralatan teknik kelautan dan kapal teknologi tinggi, peralatan kereta api, kendaraan hemat energi dan energi terbarukan, peralatan listrik, peralatan pertanian, bahan baru, serta biofarmasi dan produk kesehatan tingkat lanjut (Balderrama & Trejo, 2015). Pada sektor tersebutlah, pemerintah Tiongkok menyalurkan bantuan dana berupa investasi yang akan mendukung perkembangan masing-masing sektor. Pemerintah Tiongkok juga melakukan beberapa upaya untuk mengukur kinerja masing-masing sektor dari 2015 hingga 2025. Upaya tersebut berupa indikator kinerja utama yang meliputi biaya penelitian dan pengembangan, paten, daya saing manufaktur, penetrasi Broadband dan lain-lain (Sprugel, 2023).

Tabel 1. Perusahaan Besar di 10 Sektor Utama di MiC 2025 (O'Connor, 2018)

Sektor Industri	Perusahaan Besar Tiongkok	Perusahaan Asing
Teknologi Informasi Baru	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan Huawei Teknologi Perusahaan ZTE Tencent 	<ul style="list-style-type: none"> America Movil Telesistem Seluler
Peralatan Mesin Otomatis dan Robotika	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan Peralatan CNC GSK Perusahaan Kontrol Numerik Huazhong Wuhan (HNC) Perusahaan Peralatan Mesin Shenyang 	<ul style="list-style-type: none"> Mori Seiki Matsuura Yamazaki Mazak
	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan Robot & Otomasi SIASUN Perusahaan Industri Riland Shenzhen Teknologi Jasic Shenzhen 	<ul style="list-style-type: none"> ABB Ltd. Perusahaan Robotika KUKA Perusahaan FANUC
Peralatan Dirgantara dan Penerbangan	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan Industri Penerbangan Tiongkok (AVIC) COMAC Perusahaan Pesawat Xi'an 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan Mesin Aero Honeywell Suzhou Ltd, GE, Pratt & Whitney
Peralatan Teknik Kelautan dan Kapal Teknologi Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan Pembuatan Kapal Negara Tiongkok (CSSC) Perusahaan Industri Pembuatan Kapal Tiongkok (CSIC) Perusahaan CMA CGM 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan Maersk Perusahaan Pengiriman Mediterania Hapag-Lloyd
Peralatan Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan Terbatas CRRC Perusahaan Sinyal Kereta Api Shenyang Perusahaan Grup Listrik Chuan Tse 	<ul style="list-style-type: none"> Bombardier Inc Industri Berat Kawasaki Alstom
Kendaraan Hemat Energi dan Energi Terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan BYD Perusahaan BAIC Grup Perusahaan Mobil Chery 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan Nissan Perusahaan Hyundai Perusahaan GM
Peralatan Listrik	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan Grup XUJI Perusahaan Teknologi ARI Perusahaan 'Tiongkok Datang' 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan Listrik Schneider Alstom Perusahaan GE

Peralatan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Grup Yunchai • Perusahaan Industri Berat Internasional Foton Lovol • Perusahaan Listrik Weichai 	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan John Deere • Perusahaan CNH • Perusahaan Grup YTO
Bahan Baru	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Teknologi Tinggi Huateng Beijing • Perusahaan Dongguan EONTEC • Perusahaan ENE-Karbon 	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan DuPont • Perusahaan BASF • Perusahaan BHP Billiton
Biofarmasi dan Produk Kesehatan Tingkat Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Grup Farmasi Yantai Dongcheng • Perusahaan Tongrentang (TRT) • Perusahaan Instrumen Medis Zhuhai Hokai 	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Johnson & Johnson • Perusahaan GE • Perusahaan Siemens AG

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Tiongkok telah melakukan konsolidasi di beberapa perusahaan lokal pada sektor-sektor penting yang menjadi fokus utama MiC 2025. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa tujuan Tiongkok dalam meningkatkan kapasitas bahan inti dalam negeri tidak serta merta menghilangkan kesempatan untuk bekerjasama dengan perusahaan multinasional dalam 10 sektor utama.

Rencana perwujudan MiC 2025 didukung oleh beberapa kebijakan, salah satunya adalah kebijakan 'Internet Plus' yang diresmikan ditahun yang sama dengan MiC 2025 yaitu pada tahun 2015. Kebijakan Internet plus merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengintegrasikan penggunaan internet pada industri manufaktur tradisional di seluruh wilayah/prefektur Tiongkok terutama yang menjadi pusat pengembangan 10 sektor inti dalam MiC 2025 (Hvistendahl & Pardhi, 2020). Prefektur/wilayah tersebut antara lain adalah Shenzhen, Beijing, Shanghai, Shenyang, Guangdong, dan lain-lain.

Perusahaan teknologi Huawei yang berfokus pada sektor teknologi dan informasi diyakini menjadi salah satu kunci pemerintah Tiongkok dalam MiC 2025 (Hvistendahl & Pardhi, 2020). Salah satu produk yang dikembangkan oleh Huawei adalah teknologi jaringan 5G yang menjadi strategi pemerintah Tiongkok dalam MiC 2025. Pengembangan teknologi 5G ini diyakini akan sangat membantu, tidak hanya pada perekonomian negara tetapi juga pada aspek sosial masyarakat. 5G menciptakan revolusi industri keempat dengan mengintegrasikan dunia digital, biologis, dan fisik (TEKİR, 2020). Adanya jaringan 5G menciptakan sistem yang otonom dan cerdas melalui dorongan data dan pembelajaran mesin sehingga meningkatkan dan mengembangkan produksi industri.

Upaya pemerintah Tiongkok dalam mendukung pengembangan jaringan 5G dapat dilihat melalui pembangunan jaringan kabel optik lintas batas. Pemerintah Tiongkok telah meningkatkan 7% pembangunan kabel optik lintas batas di wilayah selatan pada tahun 2012-2015 serta 20% pada tahun 2016-2019 (TEKİR, 2020). Kabel optik ini akan sangat penting bagi perkembangan jaringan 5G. Kabel inilah yang akan meningkatkan arus lalu lintas data antar negara. Dengan pembangunan infrastruktur kabel optik lintas batas, perusahaan-perusahaan di Tiongkok dapat memanfaatkan jaringan 5G dengan lebih baik dan dapat memasuki pasar jaringan telekomunikasi.

Dampak Agenda MiC 2025 terhadap Perusahaan Multinasional

1. Persaingan ekonomi

Perlu dipahami bahwa perusahaan multinasional di Tiongkok terbagi menjadi dua jenis, perusahaan asal Tiongkok dan perusahaan asing (Foreign-Invested Enterprises). Adanya MiC 2025 menyebabkan adanya persaingan antara keduanya. MiC 2025

seperti yang telah dijelaskan, adalah sebuah strategi dari pemerintah Tiongkok untuk mengembangkan dan meningkatkan industri manufaktur dalam negeri. Salah satu langkahnya adalah dengan memberikan bantuan finansial kepada perusahaan-perusahaan asal Tiongkok untuk mengembangkan dan meningkatkan produk-produk yang dihasilkan. Pemberian subsidi atau bantuan dana inilah yang dinilai menjadi sebuah kesenjangan antara perusahaan lokal dan perusahaan asing. Selain itu, kebijakan pemerintah Tiongkok yang mendukung penuh perusahaan-perusahaan lokal juga menjadi tantangan tersendiri.

Persaingan ekonomi meliputi 10 sektor utama MiC 2025, salah satu satunya adalah sektor teknologi informasi. Adanya agenda MiC 2025 mendorong masyarakat Tiongkok untuk mendukung produk-produk dalam negeri, salah satunya adalah penggunaan handphone dari perusahaan lokal yaitu Huawei. Hal tersebut juga yang mendasari pemerintah untuk melarang iPhone masuk ke pasar Tiongkok. Perusahaan Huawei sendiri merupakan perusahaan manufaktur telepon terbesar kedua setelah Samsung, dan perusahaan penyedia telekomunikasi terbesar di pasar global (Pranto & Nazmul, 2020). Hubungan baik antara perusahaan Huawei dengan pemerintahan Tiongkok mempermudah jalan Huawei dalam mendominasi pasar domestik dan juga Internasional.

Pelarangan penggunaan iPhone di Tiongkok telah mengakibatkan berkurangnya jangkauan pasar Apple. Meskipun sumber penghasilan Apple bukan hanya pada penjualan iPhone, tetapi penjualan iPhone merupakan sumber penghasilan terbesar Apple. Adanya pelarangan iPhone ini mengakibatkan Apple kehilangan penghasilan sebesar 19% di pasar Tiongkok (Pranto & Nazmul, 2020). Hal tersebut dikarenakan Tiongkok merupakan pasar besar dengan kapasitas penduduk yang besar. Disisi lain, harga jual iPhone yang tinggi mengakibatkan konsumen-konsumen di Tiongkok beralih pada produk lain seperti Huawei. Selain harga Huawei lebih terjangkau, Huawei juga sudah menawarkan kualitas produk yang unggul serta dilengkapi dengan inovasi baru Huawei yaitu teknologi jaringan 5G (Terry, 2019). Dukungan penuh pemerintah dengan pembangunan infrastruktur untuk jaringan 5G berdampak besar pada peningkatan penjualan produk Huawei.

2. Kolaborasi dan transfer teknologi

Persaingan ekonomi secara ketat dapat diatasi melalui kolaborasi dan transfer teknologi antara perusahaan multinasional lokal dan perusahaan multinasional asing. Langkah ini merupakan salah satu alternatif yang dapat menguntungkan kedua belah pihak di tengah inisiasi MiC 2025. Transfer teknologi dapat memenuhi ekspektasi pemerintah agar perusahaan lokal yang bergerak di sektor prioritas lebih mudah dalam mengelola dan memajukan teknologinya. Alih-alih bersaing dengan perusahaan lokal yang disokong pemerintah Tiongkok, perusahaan multinasional asing dapat berkolaborasi untuk memperoleh keuntungan yang stabil.

Bentuk kolaborasi antara perusahaan lokal dengan perusahaan multinasional asing dilakukan oleh perusahaan SAIC Motor (Shanghai Automotive Industry Corporation) yang melakukan kemitraan (joint venture) dengan perusahaan asing asal Jerman, Audi AG. Pada Juli 2023 lalu, Audi dan SAIC mengkonfirmasi kolaborasi dalam proyek kendaraan elektronik berbasis listrik (Mihalascu, 2023). Sebelumnya, perusahaan induk Audi, Volkswagen Group sudah pernah melakukan joint venture dengan SAIC Motor dalam produksi mobil bertenaga bensin. Kolaborasi antara SAIC dan Audi termasuk dalam transfer teknologi antarkedua perusahaan. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk mempercepat elektrifikasi portofolio kedua perusahaan dalam pasar kendaraan listrik yang berkembang pesat di Tiongkok (Mihalascu, 2023).

Meskipun begitu, transfer teknologi juga dapat memberikan dampak buruk bagi perusahaan multinasional asing. Perusahaan lokal bersama-sama dengan pemerintah Tiongkok berpotensi untuk menggunakan teknologi hasil transfer sebagai alat penyeimbang dan bersaing dengan perusahaan multinasional asing di pasar global. Hal

ini tidak terlepas dari tujuan utama dari MiC 2025 yaitu untuk menciptakan dominasi Tiongkok dalam sektor industri utama pasar global. Oleh karena itu, perusahaan multinasional perlu waspada dan mempertimbangkan ajakan kolaborasi dengan perusahaan lokal. Ajakan kolaborasi harus memberikan keuntungan yang sebanding dengan teknologi yang dibagikan.

3. Robotisasi pekerja

Salah satu alasan perusahaan multinasional mendirikan perusahaan cabang di negara lain adalah melimpahnya tenaga kerja dengan upah/gaji yang terjangkau. Namun, digitalisasi industri Tiongkok ini mendorong perubahan fungsi pekerja dengan teknologi, salah satunya adalah robot. Bagi pemerintah, robotisasi pekerja dianggap sebagai langkah yang efektif di tengah banyaknya kasus kurangnya pemenuhan hak pekerja dan buruknya kondisi kerja. Langkah ini menekankan aspek efektifitas dan efisiensi industri manufaktur untuk memaksimalkan rencana MiC 2025 yang tujuan utamanya adalah dominasi Tiongkok dalam pasar global.

Bagi perusahaan multinasional, robotisasi pekerja dapat menjadi peluang sekaligus ancaman yang signifikan dalam hal teknis dan operasional perusahaan. Upaya perubahan persepsi “tenaga kerja murah” di Tiongkok akan mendorong perusahaan multinasional untuk melakukan restrukturisasi pasokan tenaga kerja di Tiongkok dan lebih memerhatikan profit yang didapat. Dalam industri bidang tertentu, robotisasi pekerja memberikan keuntungan bagi perusahaan multinasional dengan tidak perlu membayar asuransi pekerja dan tidak perlu terjerat dalam ketidakpastian hukum ketenagakerjaan (Brown, 2021). Dampak lainnya dari robotisasi pekerja adalah menghambatnya perusahaan multinasional dari Tiongkok. Hal ini akan mengurangi *inflow* FDI dan berakibat buruk terhadap stabilitas ekonomi Tiongkok. Efisiensi robot yang lebih memberikan keuntungan daripada tenaga kerja murah akan mendorong perusahaan multinasional untuk kembali ke negara asal dengan menerapkan teknologi robot daripada beroperasi di luar negeri (Brown, 2021). Terlebih lagi, image tenaga kerja murah yang melekat pada Tiongkok sudah perlahan hilang.

4. Perang tarif dengan Amerika Serikat

Rencana Tiongkok dalam digitalisasi industri mendapatkan reaksi yang cukup negatif dari dunia internasional. Agenda ini dianggap dapat mengancam perusahaan pemasok teknologi tinggi asing dan bahkan melanggar peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pemerintah Tiongkok merespon kritikan ini dengan memastikan bahwa MiC 2025 bersifat transparan, terbuka, dan tidak diskriminatif (CRS, 2019). Ketika inisiasi ini diluncurkan pada tahun 2015 lalu, presiden Amerika Serikat merupakan salah satu pihak yang menentang rencana MiC 2025. Donald Trump mengeluarkan pernyataan bahwa usaha Tiongkok dalam digitalisasi industri merupakan kebijakan distorsi terkait transfer teknologi, kekayaan intelektual, dan inovasi (CRS, 2019). Pernyataan ini berujung pada pemberlakuan tindakan pasal 301 termasuk kenaikan tarif selama dua tahun kepada Tiongkok pada tahun 2018 lalu oleh Perwakilan dagang AS (US Trade Representative/USTR) (CRS, 2019). Meskipun mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan, pemberlakuan pasal ini dianggap kurang efektif karena belum mampu menghentikan tekad Tiongkok untuk menguasai pasar global melalui realisasi MiC 2025.

Pemerintah Tiongkok merespon dengan kebijakan penambahan tarif balasan kepada Amerika Serikat. Perang tarif ini cukup memberikan dampak negatif bagi perusahaan multinasional di Tiongkok, salah satunya adalah hilangnya pasar Amerika Serikat. Menurut data dari statistica.com, impor barang dari Tiongkok menurun dari 538,51 miliar USD pada tahun 2018 menjadi 432,68 miliar USD pada tahun 2020 (Statistica, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif ini membuat konsumen Amerika Serikat lebih memilih produk lokal dibandingkan dengan produk Tiongkok karena keterjangkauan harga. Di samping itu, perusahaan multinasional kesulitan dalam menekan harga jual barang di pasar global. Survei dari *Cambridge University Press* menunjukkan lebih dari 63% perusahaan multinasional Amerika Serikat di

Tiongkok terkena dampak buruk dari perang tarif, 22% diantaranya menyuarakan penolakan, dan 7% lainnya hengkang dari Tiongkok (R. et al., 2022).

KESIMPULAN

MiC 2025 telah menciptakan tantangan dan peluang untuk perusahaan multinasional di Tiongkok. Adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung strategi MiC 2025 turut serta menjadi penyebab tantangan dan peluang bagi para perusahaan multinasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah Tiongkok memegang kendali penuh terhadap perekonomian nasional melalui MiC 2025. Pada 10 sektor utama yang berusaha dikembangkan oleh pemerintah Tiongkok, perusahaan multinasional dituntut untuk mencari peluang yang menguntungkan. Pada kondisi ini, perusahaan multinasional baik perusahaan lokal Tiongkok maupun perusahaan asing haruslah mematuhi atau beradaptasi dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Strategi MiC 2025 sendiri merupakan perwujudan dari kebijakan proteksionisme terhadap perekonomian nasional. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui teori neo merkantilisme yang mana melalui MiC 2025, pemerintah Tiongkok berusaha untuk membatasi jumlah impor dan ketergantungan pada produk asing serta mendorong jumlah ekspor. Pemerintah Tiongkok juga berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Melalui 3 tahap pengembangan, pemerintah Tiongkok berusaha untuk membangun perekonomian secara perlahan. Langkah modernisasi struktur produktif meningkatkan dan menguatkan produktivitas industri manufaktur di Tiongkok. Dengan menekankan pada kualitas dan daya jual, produk-produk tersebut nantinya menjadi komoditas ekspor yang akan meningkatkan perekonomian Tiongkok.

Selain menaikkan jumlah produk ekspor, pemerintah Tiongkok juga secara jelas melakukan kampanye nasionalisme yang mana pemerintah berusaha untuk menaikkan penjualan produk domestik. Salah satunya adalah sikap pemerintah Tiongkok yang melarang pemasaran produk Apple untuk mendukung produk domestik yaitu Huawei. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dominasi produk asing pada pasar domestik. Adanya MiC 2025 sebagai upaya kebijakan proteksionisme terhadap ekonomi nasional sudah menunjukkan upaya Tiongkok untuk menjamin ketahanan dan keberlangsungan ekonomi di masa depan. Selain berorientasi pada keuntungan, pemerintah Tiongkok juga menargetkan dominasi pasar untuk menjamin keamanan ekonomi nasionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Balderrama, R., & Trejo, A. (2018). *made in china 2025*. *ReVista (Cambridge)*, 18(1), 63-1A.
- Brown, C. M. ... Schubert, P. L. (2021). Outbreak of SARS-CoV-2 infections, including COVID-19 vaccine breakthrough infections, associated with large public gatherings—Barnstable County, Massachusetts, July 2021. *Morbidity and Mortality Weekly Report*, 70(31), 1059.
- Brown, L. D. (2003). Ranking journals using social science research network downloads. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 20, 291–307.
- Brown, R. C. (2016). *Made in China 2025: Implications of Robotization and Digitalization on MNC Labor Supply Chains and Workers' Labor Rights in China*. *Tsinghua China L. Rev.*, 9, 186.
- Dalla Valle, C. (2021). *Foreign Invested Enterprises in China: evolution and revolution of the legal framework with Chinese-English terminological glossary*.
- Fang, J., & Walsh, M. (2018). *Made in China 2025: Beijing's manufacturing*

- blueprint and why the world is concerned. ABC News.
- Goldstein, S. M. (2019). *China briefing*, 1984. Routledge.
- Kennedy, S. (2015). *Made in China 2025* In CSIS Analysis. Available at <https://www.csis.org/analysis/made-china-2025>.
- Lim, T. C. (2014). *International political economy: An introduction to approaches, regimes, and issues*. [KNXB].
- Lundvall, B.-Å., & Rikap, C. (2022). China's catching-up in artificial intelligence seen as a co-evolution of corporate and national innovation systems. *Research Policy*, 51(1), 104395.
- Oswin, A. A. ... Nana, K. N. (2019). The 1978 economic reforms of China and its impact on economic growth-A time series data analysis. *Journal of Statistics and Management Systems*, 22(8), 1511–1538.
- Pantelopoulos, G. (2023). Human Capital, Gender Equality and Foreign Direct Investment: Evidence from OECD Countries. *Journal of the Knowledge Economy*, 1–17.
- Peng, M. W. (2012). The global strategy of emerging multinationals from China. *Global Strategy Journal*, 2(2), 97–107.
- Rooi, N. ... Van der Waldt, G. (2023). Corporate social responsibility applications in the retail sector: Lessons from the international experience. *Journal of Contemporary Management*, 20(1), 499–535.
- Seong, J. Leung, M. N. (2023). The China imperative for multinational companies.
- Sprugel, L. M. (2023). China Market Entry. In *Contemporary Strategic Chinese American Business Negotiations and Market Entry* (pp. 231–280). Springer.
- Wang, Y. (2000). *Menembus Pasar Cina*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Yao, W. ... Hamori, S. (2013). An empirical analysis of the relationship between economic development and population growth in China. *Applied Economics*, 45(33), 4651–4661.



[This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)